

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis perbandingan indikator kinerja keuangan pemerintah daerah yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diberikan.

Kabupaten Morowali dan Kota Palu menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi. Hasil analisis kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Morowali memiliki peringkat tertinggi, yaitu 20,48% dan Kota Palu pada peringkat kedua, yaitu 18,92%. Kabupaten Morowali maupun Kota Palu telah berhasil mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, efektifitas pengelolaan sumber daya, dan dukungan terhadap tenaga kerja lokal.

Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Tojo Una-Una memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang serupa, yaitu berkisar antara 7 – 9,40%. Daerah-daerah ini berhasil memanfaatkan potensi sumber daya alam dan melakukan diversifikasi pendapatan melalui berbagai potensi sektor yang ada pada masing-masing daerah, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, hingga agrowisata. Langkah-langkah strategis dalam mengatur pendapatan, mendorong investasi, dan mengembangkan sektor yang berpotensi telah berkontribusi pada kemandirian keuangan daerah.

Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki tingkat kemandirian keuangan yang paling rendah di antara daerah lainnya, yaitu 3,74%. Meskipun memiliki skala pemerintahan yang besar, tingkat kemandirian yang rendah menunjukkan adanya masalah dalam manajemen keuangan pemerintah daerah, seperti optimalisasi potensi riil PAD. Optimalisasi potensi riil PAD seperti pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah, mendukung pembangunan infrastruktur, dan memperkuat ekonomi daerah secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan Halim dan Kusufi (2013), rasio kemandirian juga mampu menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Hasil analisis efektivitas PAD menunjukkan bahwa Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kota Palu menunjukkan tingkat efektivitas PAD yang lebih tinggi dari kisaran efektivitas PAD yaitu 100%. Hasil analisis kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Sigi memiliki peringkat tertinggi, yaitu 115,77% Kabupaten Tojo Una-Una pada peringkat kedua, yaitu 115,03%, dan Kota Palu pada peringkat ketiga, yaitu 114,44%. Kabupaten Sigi menjadi contoh sukses dalam mengelola PAD. Meskipun memiliki ukuran pemerintah yang tidak terlalu besar, Kabupaten Sigi mampu melebihi target anggaran PAD, terutama melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata. Sementara Kabupaten Tojo Una-Una dan Kota Palu juga berhasil

mencapai efektivitas PAD yang tinggi dengan mengoptimalkan potensi pariwisata dan infrastruktur.

Pada daerah-daerah lain dengan kisaran efektivitas PAD diatas 100% seperti Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Banggai Kepulauan juga menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien. Namun, terdapat juga potensi untuk lebih mengoptimalkan PAD yang dapat dianalisis melalui evaluasi lebih lanjut terhadap program PAD yang dimiliki pemerintah daerah, seperti optimalisasi pajak dan retribusi pada sektor-sektor yang ada di daerah masing-masing.

Kabupaten Buol, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Morowali memiliki efektivitas PAD di bawah 100%. Daerah-daerah ini, terutama yang berukuran menengah, dapat meningkatkan manajemen keuangan dan mengoptimalkan sektor unggulan untuk lebih meningkatkan efektivitas PAD. Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan Halim dan Kusufi (2013) bahwa semakin besar rasio efektivitas berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik, karena semakin besar realisasi penerimaan PAD maka semakin efektif realisasi pendapatan asli daerah berdasarkan target PAD.

Kabupaten Morowali Utara menjadi dengan efektivitas PAD terendah di Sulawesi Tengah, yaitu 62,49%. Ketergantungan pada sektor tertentu yaitu sektor pertambangan nikel menyebabkan fluktuasi pendapatan dari sektor tersebut dapat secara langsung mempengaruhi efektivitas PAD. Dampak lingkungan dari sektor unggulan daerah yang merugikan sektor lain dengan potensi PAD daerah harus dievaluasi dan lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah. Pada keseluruhan,

analisis efektivitas PAD menyoroiti variasi efektivitas PAD di berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi pencapaian efektivitas tersebut, termasuk diversifikasi pendapatan, pengelolaan sumber daya, dan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

Hasil analisis keserasian menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai Laut memiliki peringkat tertinggi dalam rasio belanja pembangunan terhadap APBD di antara daerah lainnya, mencapai 25,33%, dengan rasio belanja rutin sebesar 62,30%. Sementara daerah dengan nilai rasio belanja rutin terhadap APBD tertinggi adalah Kota Palu, yaitu 83,24%. Kabupaten Banggai Laut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki prioritas dan peran yang signifikan dalam mendorong pembangunan di daerah. Hal ini sesuai dengan salah satu strategi yang dibutuhkan Indonesia sebagai negara berkembang dimana peranan pemerintah daerah untuk memacu terlaksananya pembangunan harus relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

Sementara persentase tertinggi rasio belanja rutin terhadap APBD yang dimiliki Kota Palu mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran Kota Palu digunakan untuk belanja rutin, seperti gaji pegawai dan biaya operasional. Anggaran yang dominan untuk belanja rutin seperti pada daerah-daerah dengan rasio belanja rutin terhadap APBD yang tinggi dan rasio belanja pembangunan terhadap APBD yang rendah kemungkinan dapat menghambat inovasi dan pengembangan baru dalam layanan publik dan pembangunan.

DSCR yang tinggi, seperti DSCR 151,98 pada Kabupaten Banggai dan DSCR 36,13 pada Kabupaten Morowali, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kedua daerah tersebut cukup untuk menanggung angsuran utang, bunga, dan biaya lainnya. Nilai DSCR yang positif ini melebihi ketentuan minimal DSCR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, yaitu 2,5 atau 250%. Selanjutnya DSCR yang rata-rata negatif pada Kota Palu, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten Parigi Moutong mengindikasikan bahwa ketiga daerah ini tidak layak untuk melakukan pinjaman daerah. DSCR yang negatif menunjukkan bahwa PAD tidak cukup untuk menutupi beban utang dan biaya lainnya.

Hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dengan 3 indikator menunjukkan bahwa daerah dengan peringkat kinerja terbaik adalah Kota Palu, dan daerah dengan peringkat terendah adalah Kabupaten Morowali Utara.

Hasil uji beda ANOVA (*Analysis of Variance*) satu arah (*one-way ANOVA*) menunjukkan nilai *sig* kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,002. Pada penelitian ini, nilai *sig* kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah 13 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah.

5. 2. Saran

Hasil evaluasi melalui analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan keberagaman kinerja keuangan pemerintah daerah yang dicapai 13 kabupaten/kota di Sulawesi

Tengah. Lebih lanjut, penting untuk memperhatikan bahwa penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan perlu diperhatikan, namun lebih baik juga jika penelitian melakukan analisis yang lebih mendalam berdasarkan data ataupun informasi yang dapat dipercaya, seperti data dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dihasilkan oleh BPK.

Bagi pemerintah daerah, peneliti merumuskan beberapa rekomendasi berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Pemerintah daerah perlu untuk melakukan usaha lebih untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama efektivitas PAD melalui penggalian potensi-potensi sumber PAD daerah yang baru, serta optimalisasi pendapatan daerah dari PAD yang sudah ada selama ini. Selain untuk mencapai efektivitas PAD, hal tersebut juga berperan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan semakin besarnya PAD dibanding pendapatan daerah dari pemerintah pusat dan sumber dana eksternal lainnya, pemerintah daerah tidak terlalu bergantung pada sumber dana eksternal dan menjadi semakin mandiri. Pemerintah daerah juga dapat mengevaluasi program-program kerja di masing-masing daerah dengan mempertimbangkan keserasian keuangan daerah, yang dapat dilihat dari perbandingan belanja rutin terhadap APBD dan belanja pembangunan terhadap APBD.

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah keterbatasan waktu dalam memperoleh data penelitian. Pada awalnya penelitian ini akan dilakukan juga dengan data LKPD 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah tahun 2022

sebagai data laporan keuangan terbaru. Namun pada proses pengumpulan data peneliti mengetahui bahwa penelitian ini tidak dapat melibatkan LKPD 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah tahun 2022 sebab hingga penelitian ini dilakukan yaitu Agustus 2023, laporan tersebut belum selesai diaudit oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah, sehingga LKPD atas 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah tahun 2022 belum tersedia untuk dapat diakses peneliti. Data yang lebih lama mungkin memiliki keterbatasan dalam hal akurasi dan detail penelitian. Data LKPD tahun terbaru yang tidak tersedia membuat peneliti melakukan pertimbangan untuk menggunakan berbagai sumber data lainnya seperti berita tahun 2022 yang dapat memberikan pandangan lebih tentang kinerja keuangan pemerintah daerah di lapangan.

Dengan demikian saran bagi penelitian mendatang mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah terutama pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah antara lain, yaitu memastikan data yang digunakan dalam penelitian layak untuk digunakan, yaitu masih relevan dan akurat untuk menjadi dasar perhitungan dan analisis indikator kinerja keuangan pemerintah daerah. Ketika menggunakan data LKPD yang bukan tahun terbaru, penting untuk memberikan catatan tentang perubahan konteks yang signifikan setelah tahun data tersebut. Ini akan membantu dalam interpretasi yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisan. (2022, September 23). *Sangalu.com*. Retrieved from <https://www.sangalu.com/daerah/pr-834889627/meski-tak-terurus-dispar-banggai-gelontorkan-miliaran-rupee-di-pulau-dua-untuk-fasilitas-wisata-sejak-2013>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, J. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman (Edisi 6, Cetakan Kesepuluh)*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hendriyadi, S. (2011). *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Antara Tahun 2008 - 2009*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Magdalena, M., & Kurniawan, C. H. (2013). Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Modus*, 25(1), 91-106.
- Mardiasmo. (2003). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyadi. (2001). *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa. Edisi 3*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

prokopim.parigimoutongkab.go.id. (2023, Maret 27). *prokopim.parigimoutongkab.go.id*. Retrieved from <https://prokopim.parigimoutongkab.go.id/2023/03/27/pemda-parigimoutong-paparkan-ke-pemprov-sulteng-terkait-kesiapan-sebagai-tuan-rumah-festival-durian-tahun-2023/>

Purnomo, G. S. (2018). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah di Indonesia)*. Thesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Putra, A. S. (2013). *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rankin, M., Ferlauto, K., McGowan, S., & Stanton, P. (2012). *Contemporary Issues in accounting 2nd edition*. Australia: John Wiley & Sons Australia, Ltd.

Shah, A. (2006). *Local Government Finance in Developing Countries*. World Bank Publications.

Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Fokusmedia.

sulteng.antaranews.com. (2022, September 16). *sulteng.antaranews.com*. Retrieved from <https://sulteng.antaranews.com/berita/254801/pemkab-banggai-kepulauan-prioritaskan-pengembangan-objek-wisata>

sulteng.antaranews.com. (2023, Februari 22). Retrieved from <https://sulteng.antaranews.com/berita/262131/parigi-moutong-bangun-kampung-durian-untuk-kepentingan-agrowisata>

Susantih, H., & Saftiana, Y. (2008). *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan*. Thesis Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Palembang.

tvonenews.com. (2022, Januari 26). *tvonenews.com*. Retrieved from <https://www.tvonenews.com/lifestyle/travel/24593-pariwisata-poso-anjlok-karena-terkenal-sebagai-daerah-rawan-terorisme-bupati-curhat-ke-menparekraf-sandiaga-uno>

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.



LAMPIRAN I

KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

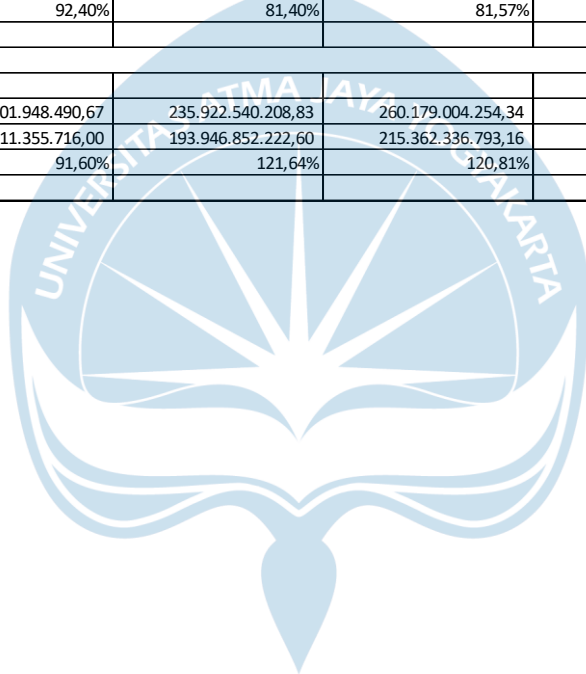
		2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
1	Kabupaten Banggai :					
	Realisasi PAD (Rp)	135.426.630.832,28	165.863.778.696,68	157.994.144.272,97	190.462.129.225,83	162.436.670.756,94
	Total Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	1.852.008.921.001,28	1.898.506.690.113,68	1.959.706.353.744,97	2.115.804.450.981,83	1.956.506.603.960,44
	Rasio Kemandirian (%)	7,31%	8,74%	8,06%	9,00%	8,28%
2	Kabupaten Banggai Kepulauan :					
	Realisasi PAD (Rp)	23.922.233.075,54	34.231.612.395,00	36.213.331.404,27	33.630.899.775,34	31.999.519.162,54
	Total Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	819.184.420.108,54	910.888.768.858,00	827.151.804.218,27	857.381.199.315,34	853.651.548.125,04
	Rasio Kemandirian (%)	2,92%	3,76%	4,38%	3,92%	3,74%
3	Kabupaten Banggai Laut :					
	Realisasi PAD (Rp)	21.776.178.732,73	25.803.225.522,53	26.874.825.275,01	22.179.522.152,44	24.158.437.920,68
	Total Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	607.926.366.737,03	645.075.347.880,53	654.951.876.141,41	621.163.342.477,44	632.279.233.309,10
	Rasio Kemandirian (%)	3,58%	4,00%	4,10%	3,57%	3,81%
4	Kabupaten Buol :					
	Realisasi PAD (Rp)	71.898.557.955,98	82.731.306.991,13	69.335.414.536,42	56.369.112.850,66	70.083.598.083,55
	Total Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	991.137.059.162,98	984.698.721.115,27	988.075.033.094,42	924.649.520.807,66	972.140.083.545,08
	Rasio Kemandirian (%)	7,25%	8,40%	7,02%	6,10%	7,19%
5	Kabupaten Donggala :					
	Realisasi PAD (Rp)	60.135.251.908,54	82.731.306.991,13	106.028.267.179,49	64.184.137.263,07	78.269.740.835,56
	Total Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	1.164.902.560.903,20	1.885.423.205.858,13	1.266.838.755.205,49	1.273.072.161.149,07	1.397.559.170.778,97
	Rasio Kemandirian (%)	5,16%	4,39%	8,37%	5,04%	5,74%
6	Kabupaten Morowali :					
	Realisasi PAD (Rp)	181.232.941.457,03	221.946.739.695,07	310.035.234.830,19	342.477.281.405,69	263.923.049.347,00
	Total Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	1.094.918.270.074,03	1.165.567.038.362,07	1.292.602.327.666,77	1.533.666.041.753,69	1.271.688.419.464,14
	Rasio Kemandirian (%)	16,55%	19,04%	23,99%	22,33%	20,48%
7	Kabupaten Morowali Utara :					
	Realisasi PAD (Rp)	56.083.076.336,59	42.338.942.001,82	51.972.005.828,63	103.899.132.338,74	63.573.289.126,45
	Total Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	989.137.928.956,59	1.057.111.163.817,82	1.027.384.337.792,65	1.085.560.361.898,74	1.039.798.448.116,45
	Rasio Kemandirian (%)	5,67%	4,01%	5,06%	9,57%	6,08%

		2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
8	Kabupaten Parigi Moutong :					
	Realisasi PAD (Rp)	163.657.795.142,81	186.487.511.550,43	132.865.981.771,45	123.509.039.755,86	151.630.082.055,14
	Total Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	1.490.820.672.938,81	1.758.859.994.140,43	1.642.360.239.499,45	1.557.981.071.192,86	1.612.505.494.442,89
	Rasio Kemandirian (%)	10,98%	10,60%	8,09%	7,93%	9,40%
9	Kabupaten Poso :					
	Realisasi PAD (Rp)	94.146.870.935,79	101.220.105.853,77	110.422.625.299,46	111.752.232.867,07	104.385.458.739,02
	Total Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	1.308.174.613.015,79	1.353.935.611.144,77	1.249.696.199.404,31	1.319.591.525.682,70	1.307.849.487.311,89
	Rasio Kemandirian (%)	7,20%	7,48%	8,84%	8,47%	7,99%
10	Kabupaten Sigi :					
	Realisasi PAD (Rp)	50.857.832.638,17	59.453.574.071,97	65.935.399.097,54	78.737.016.212,25	63.745.955.504,98
	Total Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	1.143.962.826.713,17	1.753.883.981.701,56	1.141.165.481.153,54	1.212.982.259.488,25	1.312.998.637.264,13
	Rasio Kemandirian (%)	4,45%	3,39%	5,78%	6,49%	5,03%
11	Kabupaten Tojo Una-Una :					
	Realisasi PAD (Rp)	61.148.549.945,07	75.800.498.011,09	74.477.357.268,01	92.453.776.360,64	75.970.045.396,20
	Total Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	1.009.031.688.116,07	1.136.792.767.957,09	1.093.029.468.237,01	1.094.406.554.791,64	1.083.315.119.775,45
	Rasio Kemandirian (%)	6,06%	6,67%	6,81%	8,45%	7,00%
12	Kabupaten Tolitoli :					
	Realisasi PAD (Rp)	80.312.115.617,43	91.724.082.741,39	96.205.583.598,37	134.494.400.744,42	100.684.045.675,40
	Total Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	1.037.997.709.118,43	1.146.983.897.809,39	1.104.742.808.910,02	1.146.372.074.331,42	1.109.024.122.542,31
	Rasio Kemandirian (%)	7,74%	8,00%	8,71%	11,73%	9,04%
13	Kota Palu					
	Realisasi PAD (Rp)	267.401.948.490,67	235.922.540.208,83	260.179.004.254,34	341.922.999.303,75	276.356.623.064,40
	Total Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	1.316.087.928.104,67	2.176.218.365.346,83	1.304.323.522.371,34	1.392.223.293.824,75	1.547.213.277.411,90
	Rasio Kemandirian (%)	20,32%	10,84%	19,95%	24,56%	18,92%

EFEKTIVITAS PAD

	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
1 Kabupaten Banggai :					
Realisasi PAD (Rp)	135.426.630.832,28	165.863.778.696,68	157.994.144.272,97	190.462.129.225,83	162.436.670.756,94
Anggaran PAD (Rp)	164.385.345.232,23	168.604.086.112,24	233.408.172.191,83	233.632.660.542,00	200.007.566.019,58
Rasio Efektivitas (%)	82,38%	98,37%	67,69%	81,52%	82,49%
Peringkat					
2 Kabupaten Banggai Kepulauan :					
Realisasi PAD (Rp)	23.922.233.075,54	34.231.612.395,00	36.213.331.404,27	33.630.899.775,34	31.999.519.162,54
Anggaran PAD (Rp)	25.788.050.400,00	31.558.305.280,00	34.012.039.869,00	34.802.251.751,00	31.540.161.825,00
Rasio Efektivitas (%)	92,76%	108,47%	106,47%	96,63%	101,09%
Peringkat					
3 Kabupaten Banggai Laut :					
Realisasi PAD (Rp)	21.776.178.732,73	25.803.225.522,53	26.874.825.275,01	22.179.522.152,44	24.158.437.920,68
Anggaran PAD (Rp)	18.690.261.383,67	25.674.580.930,00	31.056.159.077,56	20.543.491.152,00	23.991.123.135,81
Rasio Efektivitas (%)	116,51%	100,50%	86,54%	107,96%	102,88%
Peringkat					
4 Kabupaten Buol :					
Realisasi PAD (Rp)	71.898.557.955,98	82.731.306.991,13	69.335.414.536,42	56.369.112.850,66	70.083.598.083,55
Anggaran PAD (Rp)	71.924.515.155,00	82.707.829.455,00	69.266.982.596,00	56.770.407.959,00	70.167.433.791,25
Rasio Efektivitas (%)	99,96%	100,03%	100,10%	99,29%	99,85%
Peringkat					
5 Kabupaten Donggala :					
Realisasi PAD (Rp)	60.135.251.908,54	82.731.306.991,13	106.028.267.179,49	64.184.137.263,07	78.269.740.835,56
Anggaran PAD (Rp)	73.393.928.710,00	82.707.829.455,00	77.689.286.363,00	54.891.054.479,00	72.170.524.751,75
Rasio Efektivitas (%)	81,93%	100,03%	136,48%	116,93%	108,84%
Peringkat					
6 Kabupaten Morowali :					
Realisasi PAD (Rp)	181.232.941.457,03	221.946.739.695,07	310.035.234.830,19	342.477.281.405,69	263.923.049.347,00
Anggaran PAD (Rp)	350.222.229.714,11	320.368.646.798,16	303.493.382.204,21	391.060.889.788,00	341.286.287.126,12
Rasio Efektivitas (%)	51,75%	69,28%	102,16%	87,58%	77,69%
Peringkat					
7 Kabupaten Morowali Utara :					
Realisasi PAD (Rp)	56.083.076.336,59	42.338.942.001,82	51.972.005.828,63	103.899.132.338,74	63.573.289.126,45
Anggaran PAD (Rp)	86.910.535.487,00	57.109.535.534,00	145.732.139.572,00	137.392.278.000,00	106.786.122.148,25
Rasio Efektivitas (%)	64,53%	74,14%	35,66%	75,62%	62,49%
Peringkat					
8 Kabupaten Parigi					
Realisasi PAD (Rp)	163.657.795.142,81	186.487.511.550,43	132.865.981.771,45	123.509.039.755,86	151.630.082.055,14
Anggaran PAD (Rp)	171.417.007.752,09	195.187.969.885,00	122.631.831.820,95	100.439.604.441,00	147.419.103.474,76
Rasio Efektivitas (%)	95,47%	95,54%	108,35%	122,97%	105,58%
Peringkat					
9 Kabupaten Poso :					
Realisasi PAD (Rp)	94.146.870.935,79	101.220.105.853,77	110.422.625.299,46	111.752.232.867,07	104.385.458.739,02
Anggaran PAD (Rp)	96.369.710.525,00	105.214.709.039,41	110.622.054.120,56	107.845.014.453,00	105.012.872.034,49
Rasio Efektivitas (%)	97,69%	96,20%	99,82%	103,62%	99,33%
Peringkat					

		2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
10	Kabupaten Sigi :					
	Realisasi PAD (Rp)	50.857.832.638,17	59.453.574.071,97	65.935.399.097,54	78.737.016.212,25	63.745.955.504,98
	Anggaran PAD (Rp)	51.652.715.804,22	53.691.747.758,20	53.484.720.303,00	60.289.756.461,00	54.779.735.081,61
	Rasio Efektivitas (%)	98,46%	110,73%	123,28%	130,60%	115,77%
	Peringkat					
11	Kabupaten Tojo Una-Una					
	Realisasi PAD (Rp)	61.148.549.945,07	75.800.498.011,09	74.477.357.268,01	92.453.776.360,64	75.970.045.396,20
	Anggaran PAD (Rp)	55.484.553.059,00	68.993.252.661,00	67.690.252.266,86	71.113.113.338,00	65.820.292.831,22
	Rasio Efektivitas (%)	110,21%	109,87%	110,03%	130,01%	115,03%
	Peringkat					
12	Kabupaten Tolitoli :					
	Realisasi PAD (Rp)	80.312.115.617,43	91.724.082.741,39	96.205.583.598,37	134.494.400.744,42	100.684.045.675,40
	Anggaran PAD (Rp)	86.916.978.004,00	112.679.346.499,00	117.937.727.245,00	133.188.153.839,00	112.680.551.396,75
	Rasio Efektivitas (%)	92,40%	81,40%	81,57%	100,98%	89,09%
	Peringkat					
13	Kota Palu					
	Realisasi PAD (Rp)	267.401.948.490,67	235.922.540.208,83	260.179.004.254,34	341.922.999.303,75	276.356.623.064,40
	Anggaran PAD (Rp)	291.911.355.716,00	193.946.852.222,60	215.362.336.793,16	276.431.341.318,00	244.412.971.512,44
	Rasio Efektivitas (%)	91,60%	121,64%	120,81%	123,69%	114,44%
	Peringkat					



KESERASIAN

	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
1 Kabupaten Banggai :					
Total Belanja Rutin	1.051.616.513.823,00	1.261.273.049.018,37	1.280.622.999.749,00	1.412.083.627.951,22	1.251.399.047.635,40
Total Belanja Pembangunan (Rp)	224.688.829.127,50	274.787.206.474,77	169.016.197.643,00	216.631.648.676,51	221.280.970.480,45
Total APBD	1.865.244.052.799,21	1.897.560.084.440,14	1.823.685.331.255,00	2.009.070.705.713,73	1.898.890.043.552,02
Rasio Belanja Rutin	56,38%	66,47%	70,22%	70,29%	65,84%
Rasio Belanja	12,05%	14,48%	9,27%	10,78%	11,64%
2 Kabupaten Banggai Kepulauan :					
Total Belanja Rutin	473.073.078.879,82	496.126.249.963,52	473.190.146.786,00	488.324.989.590,00	482.678.616.304,84
Total Belanja Pembangunan (Rp)	200.283.688.196,00	245.022.680.227,57	161.199.586.177,00	121.975.205.216,00	182.120.289.954,14
Total APBD	824.687.940.203,82	908.657.144.730,09	809.516.707.063,00	774.774.900.295,00	829.409.173.072,98
Rasio Belanja Rutin	57,36%	54,60%	58,45%	63,03%	58,36%
Rasio Belanja	24,29%	26,97%	19,91%	15,74%	21,73%
3 Kabupaten Banggai					
Total Belanja Rutin	360.405.035.531,34	426.141.379.440,00	387.750.890.208,56	381.214.926.155,00	388.878.057.833,73
Total Belanja Pembangunan (Rp)	219.201.272.002,00	238.073.778.382,99	155.375.022.121,00	46.011.729.269,00	164.665.450.443,75
Total APBD	629.435.116.530,34	700.884.524.123,99	650.021.113.649,56	533.223.080.942,00	628.390.958.811,47
Rasio Belanja Rutin	57,26%	60,80%	59,65%	71,49%	62,30%
Rasio Belanja	34,83%	33,97%	23,90%	8,63%	25,33%
4 Kabupaten Buol :					
Total Belanja Rutin	574.698.877.374,37	602.951.960.584,83	574.358.775.356,69	584.358.017.722,31	584.091.907.759,55
Total Belanja Pembangunan (Rp)	269.853.274.545,68	227.428.102.853,00	187.303.569.968,00	165.863.625.089,18	212.612.143.113,97
Total APBD	983.582.355.889,01	981.939.169.737,67	940.304.119.179,34	897.849.834.364,49	950.918.869.792,63
Rasio Belanja Rutin	58,43%	61,40%	61,08%	65,08%	61,50%
Rasio Belanja	27,44%	23,16%	19,92%	18,47%	22,25%
5 Kabupaten Donggala :					
Total Belanja Rutin	816.118.830.222,29	852.018.913.992,00	1.294.767.629.660,00	789.889.617.051,00	938.198.747.731,32
Total Belanja Pembangunan (Rp)	147.478.090.188,00	245.238.316.762,00	222.544.216.885,00	234.698.834.400,00	212.489.864.558,75
Total APBD	1.161.139.684.806,29	1.317.674.206.095,00	1.753.740.820.620,95	1.262.577.852.471,00	1.373.783.140.998,31
Rasio Belanja Rutin	70,29%	64,66%	73,83%	62,56%	67,83%
Rasio Belanja	12,70%	18,61%	12,69%	18,59%	15,65%
6 Kabupaten Morowali :					
Total Belanja Rutin	779.648.956.301,93	861.995.275.822,78	746.071.783.487,80	877.397.367.922,96	816.278.345.883,87
Total Belanja Pembangunan (Rp)	307.690.148.308,00	280.144.328.091,11	281.977.622.416,40	265.271.692.859,15	283.770.947.918,67
Total APBD	1.090.373.004.109,93	1.159.976.227.051,81	1.234.260.310.585,70	1.391.029.815.992,71	1.218.909.839.435,04
Rasio Belanja Rutin	71,50%	74,31%	60,45%	63,08%	67,33%
Rasio Belanja	28,22%	24,15%	22,85%	19,07%	23,57%
7 Kabupaten Morowali					
Total Belanja Rutin	709.787.082.172,33	713.766.464.904,33	593.559.432.823,94	676.872.129.753,00	673.496.277.413,40
Total Belanja Pembangunan (Rp)	264.712.274.865,00	281.752.051.418,48	217.319.035.777,20	159.053.237.798,44	230.709.149.964,78
Total APBD	976.426.203.331,33	1.066.143.350.436,81	1.023.372.761.220,14	1.011.529.455.348,44	1.019.367.942.584,18
Rasio Belanja Rutin	72,69%	66,95%	58,00%	66,92%	66,14%
Rasio Belanja	27,11%	26,43%	21,24%	15,72%	22,62%
8 Kabupaten Parigi					
Total Belanja Rutin	992.127.681.951,42	1.058.413.309.795,04	1.102.517.516.852,39	1.053.796.663.121,82	1.051.713.792.930,17
Total Belanja Pembangunan (Rp)	207.438.487.697,00	286.056.301.456,89	240.239.371.636,30	149.345.528.564,00	220.769.922.338,55
Total APBD	1.489.909.477.188,42	1.666.258.285.872,93	1.690.147.516.241,69	1.524.536.819.991,82	1.592.713.024.823,71
Rasio Belanja Rutin	66,59%	63,52%	65,23%	69,12%	66,12%
Rasio Belanja	13,92%	17,17%	14,21%	9,80%	13,78%

	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
9 Kabupaten Poso :					
Total Belanja Rutin (Rp)	1.051.616.513.823,00	908.851.712.454,00	927.077.794.175,00	883.217.348.350,66	942.690.842.200,67
Total Belanja Pembangunan (Rp)	224.688.829.127,50	255.843.927.186,90	227.245.588.544,27	222.780.554.273,02	232.639.724.782,92
Total APBD	1.277.078.430.450,50	1.375.665.838.561,90	1.366.058.804.417,27	1.313.783.925.966,68	1.333.146.749.849,09
Rasio Belanja Rutin	82,35%	66,07%	67,87%	67,23%	70,88%
Rasio Belanja	17,59%	18,60%	16,64%	16,96%	17,45%
10 Kabupaten Sigi :					
Total Belanja Rutin (Rp)	721.045.442.830,38	765.768.150.880,15	1.135.784.026.273,60	907.187.464.463,00	882.446.271.111,78
Total Belanja Pembangunan (Rp)	194.039.395.735,00	234.710.153.648,02	148.298.590.535,00	165.119.514.115,00	185.541.913.508,26
Total APBD	1.112.428.389.229,38	1.002.243.589.298,17	1.500.624.994.312,60	1.283.553.436.044,00	1.224.712.602.221,04
Rasio Belanja Rutin	64,82%	76,41%	75,69%	70,68%	71,90%
Rasio Belanja	17,44%	23,42%	9,88%	12,86%	15,90%
11 Kabupaten Tojo Una-					
Total Belanja Rutin (Rp)	806.560.306.660,00	880.557.053.900,00	697.078.515.194,60	692.100.417.743,00	769.074.073.374,40
Total Belanja Pembangunan (Rp)	194.999.895.484,90	267.161.726.499,00	192.373.380.586,00	156.546.431.187,00	202.770.358.439,23
Total APBD	1.002.935.084.031,86	1.148.916.605.929,00	1.089.364.190.324,06	1.033.253.603.764,71	1.068.617.371.012,41
Rasio Belanja Rutin	80,42%	76,64%	63,99%	66,98%	72,01%
Rasio Belanja	19,44%	23,25%	17,66%	15,15%	18,88%
12 Kabupaten Tolitoli :					
Total Belanja Rutin (Rp)	699.206.917.220,00	727.372.882.000,00	730.885.876.308,00	745.923.298.811,12	725.847.243.584,78
Total Belanja Pembangunan (Rp)	183.621.018.667,00	287.501.006.743,00	190.699.517.034,00	202.417.208.755,00	216.059.687.799,75
Total APBD	1.019.779.241.046,00	1.152.615.933.545,00	1.095.466.697.457,00	1.118.273.989.889,12	1.096.533.965.484,28
Rasio Belanja Rutin	68,56%	63,11%	66,72%	66,70%	66,27%
Rasio Belanja	18,01%	24,94%	17,41%	18,10%	19,61%
13 Kota Palu					
Total Belanja Rutin (Rp)	1.008.603.988.994,00	1.025.434.530.040,00	1.527.064.078.062,00	1.347.006.916.603,00	1.227.027.378.424,75
Total Belanja Pembangunan (Rp)	181.337.240.849,10	313.104.561.961,18	187.309.386.265,00	259.476.501.891,10	235.306.922.741,60
Total APBD	1.191.550.500.271,10	1.338.835.752.001,18	1.733.031.450.274,00	1.611.481.408.559,10	1.468.724.777.776,35
Rasio Belanja Rutin	84,65%	76,59%	88,12%	83,59%	83,24%
Rasio Belanja	15,22%	23,39%	10,81%	16,10%	16,38%

LAMPIRAN II

Statistik Deskriptif

			Statistic	Std. Error
Kinerja_Keuangan_ Pemda	Mean		21.0000	.75906
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	19.4761	
		Upper Bound	22.5239	
	5% Trimmed Mean		20.9786	
	Median		20.0000	
	Variance		29.961	
	Std. Deviation		5.47364	
	Minimum		10.00	
	Maximum		33.00	
	Range		23.00	
	Interquartile Range		7.00	
	Skewness		.046	.330
	Kurtosis		-.153	.650

Descriptives

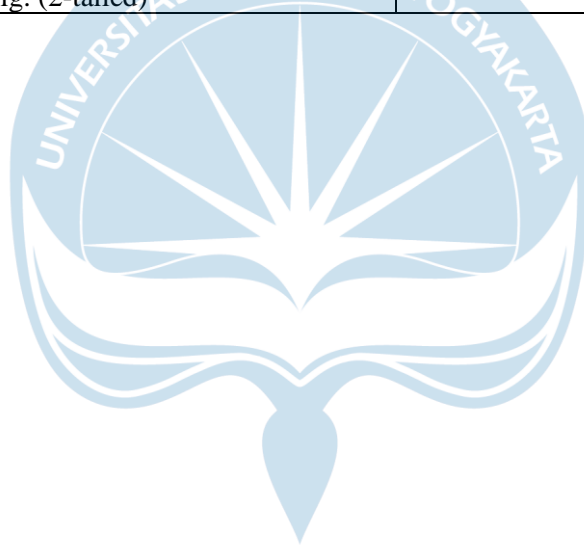
Kinerja_Keuangan_Pemda

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean
					Lower Bound
Kabupaten Banggai	4	28.2500	2.87228	1.43614	23.6796
Kabupaten Banggai Kepulauan	4	23.7500	4.57347	2.28674	16.4726
Kabupaten Banggai Laut	4	21.7500	8.01561	4.00780	8.9954
Kabupaten Buol	4	18.5000	4.43471	2.21736	11.4434
Kabupaten Donggala	4	23.2500	7.80491	3.90246	10.8306
Kabupaten Morowali	4	15.0000	3.91578	1.95789	8.7691
Kabupaten Morowali Utara	4	25.5000	1.00000	.50000	23.9088
Kabupaten Parigi Moutong	4	22.2500	2.62996	1.31498	18.0652
Kabupaten Poso	4	21.2500	3.94757	1.97379	14.9685
Kabupaten Sigi	4	22.2500	2.06155	1.03078	18.9696
Kabupaten Tojo Una-Una	4	18.0000	1.41421	.70711	15.7497
Kabupaten Tolitoli	4	19.2500	3.09570	1.54785	14.3241
Kota Palu	4	14.0000	4.89898	2.44949	6.2046
Total	52	21.0000	5.47364	.75906	19.4761

LAMPIRAN III

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov Smirnov Test		
		Kinerja_Keuangan_Pemda
N		52
Normal Parameters	Mean	21,0000
	Std. Deviation	5,47364
Most Extreme Differences	Absolute	.111
	Positive	.111
	Negative	-.074
Test Statistic		.111
Asymp. Sig. (2-tailed)		.155



LAMPIRAN IV

Hasil Uji ANOVA

ANOVA					
Kinerja_Keuangan_Pemda					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	770,000	12	64,167	3,301	.002
Within Groups	758,000	39	19,436		
Total	1528,000	51			



LAMPIRAN V
Perhitungan Total Skor Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
13 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah

Tahun 2018	Kemandirian	Efektivitas	Belanja Pembangunan	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Buol	6	3	3	12
Kabupaten Banggai Laut	12	1	1	14
Kabupaten Tojo Una-Una	8	2	6	16
Kabupaten Morowali	2	13	2	17
Kabupaten Tolitoli	4	8	7	19
Kota Palu	1	9	10	20
Kabupaten Parigi Moutong	3	6	11	20
Kabupaten Poso	7	5	8	20
Kabupaten Sigi	11	4	9	24
Kabupaten Morowali Utara	9	12	4	25
Kabupaten Banggai Kepulauan	13	7	5	25
Kabupaten Banggai	5	10	13	28
Kabupaten Donggala	10	11	12	33

Tahun 2019	Kemandirian	Efektivitas	Belanja Pembangunan	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kota Palu	2	1	7	10
Kabupaten Banggai Laut	11	5	1	17
Kabupaten Banggai Kepulauan	12	4	2	18
Kabupaten Tojo Una-Una	8	3	8	19
Kabupaten Morowali	1	13	5	19
Kabupaten Buol	5	6	9	20
Kabupaten Sigi	13	2	6	21
Kabupaten Tolitoli	6	11	4	21
Kabupaten Banggai	4	8	13	25
Kabupaten Parigi Moutong	3	10	12	25
Kabupaten Morowali Utara	10	12	3	25
Kabupaten Donggala	9	7	10	26
Kabupaten Poso	7	9	11	27

Tahun 2020	Kemandirian	Efektivitas	Belanja Pembangunan	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Morowali	1	7	2	10
Kota Palu	2	3	11	16
Kabupaten Donggala	5	1	10	16
Kabupaten Tojo Una-Una	9	4	6	19
Kabupaten Poso	3	9	8	20
Kabupaten Parigi Moutong	6	5	9	20
Kabupaten Buol	8	8	4	20
Kabupaten Tolitoli	4	11	7	22
Kabupaten Banggai Kepulauan	12	6	5	23
Kabupaten Sigi	10	2	12	24
Kabupaten Banggai Laut	13	10	1	24
Kabupaten Morowali Utara	11	13	3	27
Kabupaten Banggai	7	12	13	32

Tahun 2021	Kemandirian	Efektivitas	Belanja Pembangunan	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kota Palu	1	3	6	10
Kabupaten Morowali	2	11	1	14
Kabupaten Tolitoli	3	8	4	15
Kabupaten Donggala	11	5	2	18
Kabupaten Poso	6	7	5	18
Kabupaten Tojo Una-Una	7	2	9	18
Kabupaten Sigi	9	1	10	20
Kabupaten Buol	10	9	3	22
Kabupaten Parigi Moutong	8	4	12	24
Kabupaten Morowali Utara	4	13	8	25
Kabupaten Banggai	5	12	11	28
Kabupaten Banggai Kepulauan	12	10	7	29
Kabupaten Banggai Laut	13	6	13	32

**TOTAL SKOR KINERJA KEUANGA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2018 – 2021**

Tahun	Nama Daerah	Skor Kinerja Keuangan Pemda
2018	Kabupaten Banggai	28
2018	Kabupaten Banggai Kepulauan	25
2018	Kabupaten Banggai Laut	14
2018	Kabupaten Buol	12
2018	Kabupaten Donggala	33
2018	Kabupaten Morowali	17
2018	Kabupaten Morowali Utara	25
2018	Kabupaten Parigi Moutong	20
2018	Kabupaten Poso	20
2018	Kabupaten Sigi	24
2018	Kabupaten Tojo Una-Una	16
2018	Kabupaten Tolitoli	19
2018	Kota Palu	20
2019	Kabupaten Banggai	25
2019	Kabupaten Banggai Kepulauan	18
2019	Kabupaten Banggai Laut	17
2019	Kabupaten Buol	20
2019	Kabupaten Donggala	26
2019	Kabupaten Morowali	19
2019	Kabupaten Morowali Utara	25
2019	Kabupaten Parigi Moutong	25
2019	Kabupaten Poso	27
2019	Kabupaten Sigi	21
2019	Kabupaten Tojo Una-Una	19
2019	Kabupaten Tolitoli	21
2019	Kota Palu	10
2020	Kabupaten Banggai	32
2020	Kabupaten Banggai Kepulauan	23
2020	Kabupaten Banggai Laut	24
2020	Kabupaten Buol	20
2020	Kabupaten Donggala	16
2020	Kabupaten Morowali	10
2020	Kabupaten Morowali Utara	27
2020	Kabupaten Parigi Moutong	20
2020	Kabupaten Poso	20
2020	Kabupaten Sigi	20
2020	Kabupaten Tojo Una-Una	19
2020	Kabupaten Tolitoli	22

2020	Kota Palu	16
2021	Kabupaten Banggai	28
2021	Kabupaten Banggai Kepulauan	29
2021	Kabupaten Banggai Laut	32
2021	Kabupaten Buol	22
2021	Kabupaten Donggala	18
2021	Kabupaten Morowali	14
2021	Kabupaten Morowali Utara	25
2021	Kabupaten Parigi Moutong	24
2021	Kabupaten Poso	18
2021	Kabupaten Sigi	20
2021	Kabupaten Tojo Una-Una	18
2021	Kabupaten Tolitoli	15
2021	Kota Palu	10

